

Peranan Teori Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Indonesia

Hengki Wijaya

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan penggunaan indikator pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM provinsi tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta (79,60) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (78,38). Provinsi dengan IPM terendah adalah Papua (58,05) (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>). IPM yang masih rendah tersebut menunjukkan rendahnya pencapaian rata-rata pendidikan penduduk dan harapan lama sekolah yang bahkan berada di bawah rata-rata nasional (70,18) (Arismunandar, 2017).

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik bahwa selama tahun 2016, satu dari empat penduduk umur 5 tahun ke atas masih bersekolah, sedangkan sisanya tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Jika dikaji menurut kelompok umur, terlihat kesenjangan yang cukup nyata antar kelompok umur sekolah (7-24 tahun). Semakin tinggi kelompok umur sekolah, maka semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Partisipasi bersekolah penduduk umur 7-24 tahun relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, masing-masing sebesar 99,09 persen dan 94,88 persen. Tingginya partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dalam bersekolah sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir (BPS, 2016). Selanjutnya data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan APM TK/ sederajat (40,81), SD/ sederajat (93,73), SLTP/ sederajat (76,29) dan SM/ sederajat (61,20) (Kemdikbud, 2017). Sedangkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) anak usia sekolah di Indonesia, terutama pada jenjang SLTP sebesar 77,95; SLTA lebih rendah lagi yaitu 59,85 dan paling rendah adalah perguruan tinggi sebesar 17,91 (BPS, 2016). Data tersebut menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi (Arismunandar, 2017). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang hingga Perguruan Tinggi angka partisipasi murni (APM) semakin rendah. Dengan demikian ada banyak peserta didik yang tidak melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam Rencana Strategis periode 2015-2019 menargetkan angka melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/SMK masing-masing di atas 80 persen. Akan tetapi, hasil Susenas 2016 menunjukkan masih di bawah target yang diharapkan. Hampir 80 persen siswa SD/ sederajat melanjutkan ke SMP pada tahun 2016, sedangkan target renstra Kemdikbud 83,64 persen. Adapun angka melanjutkan ke SM/ sederajat kurang dari 60 persen. Artinya, sedikitnya 5 dari 10 siswa kelas 9 SMP/ sederajat melanjutkan ke SM/ sederajat. Angka tersebut jauh di bawah target Kemdikbud yakni sebesar 82 persen (BPS, 2016). Dengan demikian data ini menunjukkan bahwa peserta didik SLTP/ sederajat ada yang putus sekolah atau tidak melanjutkan studi ke jenjang SM/ sederajat.

Masalah Pendidikan

Berdasarkan data-data di atas penulis akan menyoroiti permasalahan putus sekolah yang terjadi pada tingkat SD hingga SM dan SMK. Rata-rata persentasi putus sekolah di SD (0,15), SMP (0,39), SM (0,84) dan SMK (1,68) (Kemdikbud, 2017). Melalui kajian literatur penulis akan menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan peserta didik putus sekolah dengan mendeskripsikan melalui teori pendidikan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Penulis akan menjelaskan teori pendidikan yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan selanjutnya menguraikan kebijakan dan strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memberikan ketahanan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana peranan lembaga pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah di Indonesia?

Teori Pendidikan

Teori Atribusi

Fritz Heider, awalnya mengusulkan teori atribusi yang kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner dan rekan-rekannya. Teori ini membahas empat penyebab utama keberhasilan dan kegagalan dalam situasi pencapaian. Snowman dan Beihler (2012) mendefinisikan atribusi sebagai kesimpulan yang dibuat individu tentang penyebab perilaku. O'Neil (2011) menyatakan bahwa orang menghasilkan penyebab ini atau penjelasan untuk memahami dunia mereka. Pada baris pemikiran yang sama, atribusi 'tingkat siswa' dapat dijadikan panduan untuk harapan mereka akan kesuksesan atau kegagalan di masa depan sehingga mengarah pada retensi atau putus sekolah (Chinyoka, 2014).

Teori atribusi telah lama dipelajari bersamaan dengan apakah siswa tersebut berharap untuk berhasil atau gagal di masa depan dan, mengingat pengetahuan yang dibangun sendiri, sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan usaha atau ketekunan dalam situasi yang sama. Dengan menggunakan contoh pernyataan seorang siswa, Mario percaya bahwa dia cerdas (penyebab internal) dan tes guru yang satu ini tidak adil, dia kemungkinan akan belajar dengan giat dan mencoba tes guru berikutnya, melihatnya sebagai pengalaman terisolasi. Namun, jika pengalaman itu berulang di kelas guru lain, dia mungkin tidak mencoba tes apapun, karena dia mungkin merasa tidak memiliki kontrol (ketidakstabilan) mengenai apakah tes itu adil (Winter and Butzon, 2009).

Peserta didik terlibat dalam lingkungan belajar karena keinginan untuk mengembangkan penyebab perilaku. Teori atribusi didefinisikan sebagai cara individu membayangkan keberhasilan atau kegagalan dari perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain (Weiner, 2004). Peserta didik cenderung menjelaskan alasan mereka untuk sukses atau gagal berdasarkan tiga dimensi: 1) internal atau eksternal, 2) stabil atau tidak stabil, dan 3) terkendali atau tidak terkendali (Rubenstein and Thoron, 2014).

Di dalam teori atribusi telah difahami bahwa setiap perilaku itu tentu mempunyai sebab. Adapun penyebab dari perilaku, tergantung dari bagaimana persepsi individu dalam melihat peristiwa itu terjadi. Persepsi individu dalam melihat penyebab perilaku (disebut sebagai atribusi penyebab) dapat dibentangkan dalam kontinum internal-eksternal. Dipersepsi mempunyai atribusi internal jika individu mempersepsi kesuksesan atau kegagalannya karena hasil dari usaha atau kemampuan sendiri (faktor disposisional atau personal), sedangkan dipersepsi mempunyai atribusi eksternal jika ia mempersepsi kesuksesan atau kegagalan sebagai hasil dari kekuatan di luar dirinya atau bukan merupakan tanggung jawab pribadinya, seperti keberuntungan atau nasib (faktor lingkungan) (Sahrah, 2011).

Teori atribusi adalah teori motivasi yang dapat digunakan dalam mengetahui penyebab seseorang berhasil atau gagalnya seseorang mencapai tujuan tertentu. teori atribusi adalah teori tentang bagaimana manusia menerangkan perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri dan

akibat dari perilakunya yang dipertanyakan, misalnya : sifat-sifat, motif, sikap, dsb atau faktor-faktor situasi eksternal.

Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah

Putus sekolah lebih awal berarti siswa tersebut tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama, pendidikan wajib dan tidak memperoleh kualifikasi atau diploma. Putus sekolah lebih awal menyiratkan melepaskan segala bentuk pendidikan dan mengacu pada anak muda yang melepaskan sekolah sebelum menyelesaikan wajib studi; menyelesaikan sekolah wajib tapi tidak mendapatkan kualifikasi setelah tingkat menengah atas; mengikuti kursus pelatihan profesional tanpa mencapai kualifikasi setara di tingkat menengah atas (Ungureanu, 2017).

Anak-anak mungkin putus sekolah karena berbagai alasan dan studi mencatat alasan ini dalam konteks spesifik berdasarkan keadaan sosial, politik, budaya dan ekonomi mereka. Joubish & Khurram (2011) dalam Lukacs and Bhadra (2003) mengemukakan bahwa buta huruf, kemiskinan, rendahnya tingkat motivasi, kurangnya pemahaman, pekerja anak, hukuman fisik, perilaku guru dan lingkungan sekolah adalah faktor yang berkontribusi terhadap orang putus sekolah di tingkat dasar.

Empat instrumen dikembangkan untuk mensurvei penyebab putus sekolah yaitu guru sekolah dasar, anak-anak yang putus sekolah, orang tua dan guru mereka. Responden berpendapat bahwa penyebab utama yang memaksa anak untuk meninggalkan sekolah adalah kecerobohan orang tua, kondisi ekonomi orang tua yang buruk, tinggal kelas, persalinan di luar sekolah (hamil di luar nikah), bolos, kesulitan dalam belajar, pilihan siswa untuk pekerja anak daripada studi, ketidakmampuan untuk terus belajar, masalah psikologis, buta huruf orang tua, dan kesehatan siswa yang buruk (Farooq, 2013).

Pada suatu penelitian disimpulkan ada lima kategori ditemukan yang menyebabkan ketidakhadiran siswa dan putus sekolah. Penyebab tersebut berasal dari keluarga, perilaku kepala sekolah dan guru, aturan sekolah, siswa dan lingkungan siswa. Ada 15 tema utama ditentukan di bawah kategori tersebut yaitu hubungan keluarga-anak, mengabaikan ketidakhadiran, masalah keluarga, pandangan pendidikan, ekonomi rendah, hubungan kepala sekolah-siswa, hubungan guru-murid, perilaku guru kelas, sikap tidak hadir, struktur sekolah, suasana negatif sekolah, adaptasi sekolah, alasan individu, hubungan dengan lingkungan, dan faktor lingkungan (Şahin, Arseven, and Kılıç, 2016).

Anak tidak sekolah merupakan sebuah kondisi sosial dimana seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP dan jenjang pendidikan di atasnya. Anak yang tidak bersekolah dengan kriteria usia 7-15 tahun merupakan pengejawantahan dari kondisi anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, atau sering dikenal dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Fenomena anak tidak sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar dengan jumlah 598 jiwa (9,89%) di enam wilayah kecamatan merupakan permasalahan yang harus segera ditemukenali berbagai faktor penyebabnya. Hasil penelitian di daerah kabupaten Banjar disebutkan tujuh faktor penyebab anak tidak sekolah, meliputi: (1) tingkat pendapatan orang tua, (2) jumlah beban tanggungan keluarga, (3) perhatian orang tua, (4) anak bekerja, (5) anak tidak minat sekolah, (6) keberadaan orang tua (yatim piatu), dan (7) akses terhadap pendidikan (Akhmadi, 2012).

Faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang meliputi tingkat pendapatan orang tua, beban tanggungan orang tua, status keberadaan orang tua, kurangnya perhatian orang tua, kondisi internal anak, sarana dan prasarana pendidikan, aksesibilitas menuju satuan pendidikan pada masing-masing wilayah kecamatan relatif berbeda antara masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Perbedaan faktor dominan anak tidak sekolah tersebut relatif dipengaruhi

kondisi karakteristik wilayah, meliputi kondisi sosial, ekonomi wilayah yang memiliki persamaan namun terdapat juga perbedaan-perbedaan. Adanya kesamaan faktor penentu anak tidak sekolah akan memudahkan dalam perumusan kebijakan pemerintah, sementara adanya perbedaan faktor penentu ini menunjukkan kejelian dalam melihat kasus-kasus wilayah agar tidak disamaratakan dalam penentuan kebijakan (Akhmadi, 2012).

Berdasarkan pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ontologis (keluarga, sekolah, dan lingkungannya) menjadi faktor yang utama anak-anak baik laki-laki dan perempuan putus sekolah. Oleh karena itu perlu dirumuskan kebijakan dan strategis yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah putus sekolah atau berhenti sekolah pada anak-anak Indonesia baik ada di perkotaan maupun di pedesaan.

Kebijakan dan Strategi untuk Mengatasi Masalah Putus Sekolah

Gejala putus sekolah terakumulasi sejak usia dini hingga SMA. Data statistik menunjukkan bahwa angka putus sekolah meningkat pada saat jenjang SMA. Semakin jelas bahwa pencegahan putus sekolah harus dimulai sedini mungkin. Adapun kebijakan dan strategis yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.

Pertama, pemerintah telah melaksanakan terhadap gerakan wajib belajar 9 hingga 12 tahun sudah dimulai dengan dikucurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan rasio jumlah murid masing-masing sekolah. BOS pun tidak berhasil mengurangi angka putus sekolah secara signifikan. Pola pendanaan beasiswa berkelanjutan untuk siswa miskin, tidak lagi semata bergantung pada political and good will pemerintah pusat atau Kemendikbud, tetapi melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

Kedua, persoalan putus sekolah bukan semata faktor kemiskinan orang tua tetapi juga faktor paradigma orang tua, perhatian guru, dan kebijakan kepala sekolah, yang tidak memihak pada amat pentingnya pendidikan bagi anak. Orang tua, guru, dan kepala sekolah kadangkala mengabaikan hak anak memperoleh pendidikan yang baik, dari tingkat dasar hingga menengah, apalagi perguruan tinggi. Orang tua lebih memilih anak-anaknya bekerja membantu orang tua dan terjadinya pernikahan dini selepas SD, SMP, atau SMA. Orang tua tidak memberikan motivasi kepada anak untuk lebih baik dari orang tuanya yang tentunya disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Orang tua kehilangan motivasi dan kerja keras untuk mengumpulkan dana demi bekal sekolah anak-anaknya kelak. Bagi siswa juga dapat memerangi keinginannya untuk putus sekolah dengan bantuan keluarga, pihak sekolah dan teman sebaya (Doll, Eslami, and Walters, 2013). Keluarga adalah agen yang paling berpengaruh di antara berbagai faktor sosial yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga, status ekonomi, status sosio-pendidikan orang tua mempengaruhi berbagai tonggak perkembangan anak (Mishra, Azeez, 2014). Mereka juga dapat menemukan tokoh atau teladan yang memberikan motivasi untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketiga, Pemerintah harus segera merumuskan desain program gerakan anti putus sekolah tersebut karena perlu melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Kemendikbud menjadi penggerak utama, yang lainnya mendukung penuh sesuai kapasitasnya masing-masing, sambil memberikan masukan-masukan yang berarti. Oleh karena itu pihak perusahaan dan pengusaha perlu membantu mencerdaskan bangsa dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan komitmen kepada pemerintah dan sekolah untuk tujuan mencerdaskan bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah yang harus dilakukan adalah mewajibkan anak-anak sejak dini untuk pendidikan dasar seperti calistung (membaca, menulis, dan berhitung) supaya mereka memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar dan

melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini menjadi kendala bagi sekolah-sekolah yang siswanya tinggal di daerah pedalaman dan kurang tenaga kependidikannya.

Keempat, Pengembangan strategi kebijakan dan intervensi yang tepat untuk membantu masyarakat miskin memperbaiki mata pencaharian mereka melalui penciptaan pendapatan, dengan memberi perhatian khusus menuju industrialisasi pedesaan, sementara modal melalui pinjaman dan hibah, dan program pengembangan kapasitas. Hal ini akan memungkinkan masyarakat pedesaan berinvestasi pada berbagai kegiatan non-pertanian dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan mereka bersama dengan kebutuhan sekolah untuk anak-anak mereka (Ntumva and Rwambali, 2013).

Keempat, pihak kepala sekolah dan komite sekolah baik negeri maupun swasta mengupayakan adanya bantuan yang bulan hanya dari pemerintah tetapi juga dari sponsor perusahaan, donatur (keluarga, sekolah, dan masyarakat) untuk mendukung sekolah terutama untuk pembiayaan anak-anak miskin, dan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Sebenarnya hal ini dapat terlaksana dengan bantuan pemerintah.

Selain itu sekolah menyediakan konselor dan melakukan sistem pelacakan longitudinal untuk lebih jelas mengidentifikasi siswa yang mungkin putus sekolah, program yang ditargetkan untuk digunakan dengan individu dan kelompok siswa yang berisiko putus sekolah, dan menawarkan strategi di sekolah dapat membantu konselor sekolah untuk lebih baik memenuhi kebutuhan putus sekolah potensial (Dockery, 2012).

Pemerintah dan semua pihak membutuhkan program intervensi yang efektif. Banyak program intervensi putus sekolah telah dikembangkan, namun kami tidak tahu siapa dari mereka yang memiliki efek terbaik pada tingkat putus sekolah. Supaya siswa tidak putus sekolah, pihak sekolah perlu mengetahui siswa mana yang paling berisiko. Pihak sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi siswa yang paling mungkin untuk putus sekolah. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi sekolah menengah atas dengan tingkat putus sekolah yang sangat tinggi. Dengan demikian, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan dapat melakukan intervensi baik pada tingkat siswa individual, maupun di tingkat sekolah atau di tingkat kabupaten. Diadaptasi dari pembahasan Burrus dan Roberts (2012).

Kelima, Data Kemendikbud (2017) menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan yang putus sekolah dari jumlah keseluruhan putus sekolah di SD (41,93%); SMP (37,03%); SMA (46,26%); SMK (35,97%). Oleh karena itu, maka di sekolah dasar dan menengah, guru wanita terlatih dan berkualitas dibutuhkan terutama selama tahap perkembangan anak perempuan harus disediakan yang juga dapat mencegah masalah kehamilan di kalangan anak perempuan yang menyebabkan anak putus sekolah (Shahidul, Karim, 2015).

Daftar Pustaka

- Akhmadi, Nuning. 2012. "Riset Kebijakan Pendidikan Anak Di Indonesia." *Prosiding Riset Kebijakan Pendidikan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU.
- Arismunandar. 2017. "Strategi Percepatan Pembangunan Pendidikan Di Daerah Pinggiran." *Seminar Nasional Kependidikan*. Merauke: FKIP Universitas Musamus.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2016 (Metode Baru)." <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>.
- Badan Pusat Statistika. 2016. "Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2016." <https://perpustakaan.setneg.go.id/repository/Potret-Pend-Ina.pdf>.
- Chinyoka, Kudzai. 2014. "Causes of School Drop out among Ordinary Level Learners in a Resttlement Area in Masvingo, Zimbabwe." *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies* 5 (3):294–300.

- Dockery, Donna J. 2012. "School Dropout Indicators, Trends, and Interventions for School Counselors." *Journal of School Counseling* 10 (12):1-33.
- Doll, Jonathan Jacob, Zohreh Eslami, and Lynne Walters. 2013. "Understanding Why Students Drop out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed or Pulled, Or Do They Fall out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative Studies." *SAGE Open* 3 (4). <https://doi.org/10.1177/2158244013503834>.
- Farooq, Muhammad Shahid. 2013. "An inclusive Schooling Model for the Prevention of Dropout in Primary Schools in Pakistan." *Bulletin of Education and Research* 35 (1): 47-74.
- Kemdikbud. 2017. "Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017." Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mishra, Pratibha J., Abdul Azeed EP. 2014. "Family Etiology of School Dropouts: A Psychosocial Study." *International Journal of Language & Linguistics* 1 (1):45-50.
- Ntumva, Mabebe E, and Emmanuel G Rwambali. 2013. "School Dropout in Community Secondary Schools : A Case of Nyamilama Secondary School-Mwanza Tanzania Description of the Study Area." *International Journal of Science and Technology* 2 (10):700–706.
- O'Neil, V. 2011. *Psychology: An Introduction (3rd edition)*. Oxford University Press. Southern Africa: Cape Town.
- Rubenstein, Eric D, and Andrew C Thoron. 2014. "Attribution Theory : How Is It Used ?" Winthrop University, Charleston Education Network.
- Şahin, Şeyma, Zeynep Arseven, and Abdurrahman Kılıç. 2016. "Causes of Student Absenteeism and School Dropouts." *International Journal of Instruction* 9 (1):195–210. <https://doi.org/10.12973/iji.2016.9115a>.
- Sahrah, Alimatus. 2011. "Pengaruh Atribusi Kesuksesan Terhadap Ketakutan Untuk Sukses Pada Wanita Karir." *Psycho Idea* 9 (2):13-21.
- Sajida Imtiaz. 2003. "Factors of Drop Out at Primary Schools Level: Case studies from the Islamic Republic of Pakistan." University of Nordland. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.
- Shahidul, S. M., A. H. M. Zehadul. 2015. "Factors Contributing To School Dropout Among The Girls: A Review Of Literature." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 3 (2):25-36.
- Snowman, J. & R. Biehler. 2012. *Psychology applied to teaching*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ungureanu, Raluca. 2017. "School Dropouts – A Theoretical Framework" *International Journal of Research in Engineering and Social Sciences* 7 (1):21–27.
- Weiner, B. 2004. "Attribution theory revisited: Transforming cultural plurality into theoretical unity." In *Big Theories Revisited*, edited by D. M. McInerney & S. Van Etten, 13–29). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Winter, LK, and Jon Butzon. 2009. "Attribution Theory and School Reform." *Nau.Edu*. <http://nau.edu/uploadedFiles/Academic/COE/About/Projects/Attribution Theory and School Reform.pdf>.